

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus & Deni Setya B. Y. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A., Imron Rizki. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- A., Muhamad Zainul. 2024. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- B., Bambang Dwi. 2008. *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Effendy, Marwan. 2010. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Yogyakarta: Timpani Pub.
- E., Danil. 2021. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, Andi. 2017. *Kejahatan dibidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed. 2, Cet. 10*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamayanti, Ari. 2024. *Konspira(kuntan)si 3*, Malang: Penerbit Peneleh.
- L., Tetty Melina., dkk. 2024. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miharja, Marjan. 2020. *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nachrawi, Gunawan & I Gusti Agung N. A. 2020. *Teori Hukum*. Bandung: Cendekia Press.
- Otto, Jan Michiel, terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyatno, H. Dwidja & Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Prenada Media.
- Qamar, Nurul & Farah Syah Rezah. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: Social Politic Genius.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Sirajuddin, Amirullah., dkk. 2024. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: Nawala Gama Education.
- Sony, Edy. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Batam: Rey Grafika Media.
- Subekti, R. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pranata.
- Sulistyowati. 2021. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sumaryanto AD. 2020. *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Jakad Media Publishing

Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

Yanuar, Muh. Afdal. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 415.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7149.

C. Jurnal

Andrianto, F. 2020. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

Anggriawan, Teddy Prima, Shinfani Kartika Wardhani, Donny Yuhendra Wibiantoro. 2023. “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2. Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1633>

Asriyani, Arini & Andi Darmawansya. 2023. “Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar (Kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks)”. *Vifada Assumption Jurnal of Law*, Vol. 1, No. 1.

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. "Penegakan Hukum". *Penegakan Hukum*, Vol. 3.
- Aulia, M. Zulfa. 2018. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- F., Mulatua S, Nggeboe. 2019. "Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1. Doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.142>
- Ilyas, Adam & Hervina Puspitosari. 2022. "Urgensi Kriminalisasi Bentuk Korupsi *Trading in Influence* dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 2.
- Indriana, Yayan. 2018. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Cepalo*, Vol. 2, No. 2. Doi: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>
- Kristanto, Kiki dkk. 2021. "Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya*, Vol. 1, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2538>
- KS., Hastuti. 2021. "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2. Doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069>
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2022. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)". *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3577>
- Meidiantama, Refi & Cholfia Aldamia. 2022. "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Internasional dan Implementasinya pada Hukum Nasional Indonesia". *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 6, No. 1. Doi: <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>
- Mulyana, Desya Septya & Yana Indawati. 2022. "Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dialihkan di Kejaksaan Negeri Surabaya". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1.521-530>

- Mustajab, Yuda & Mulyadi A. Tajuddin. 2018. "Uang Pengganti sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 2, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>
- Nurrurachman, Kevin. dkk. 2025. "Pendekatan *Follow the Money* sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1.
- Paeh, Karel Antonius. 2017. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2.
- P., Munsen Bona., Fajar., Agustin. 2024. "Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4. Doi: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.323>
- Ramadhan, Adrian Imam & Hervina Puspitosari. 2022. "Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur". *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2. Doi: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16205>
- R., Fitri Alivia. Anita Afriana. Rai Mantili. 2024. "Analisis Gugatan *In Rem* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Berdasarkan Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Acta Jurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1922>
- Sambas, Nandang & Ade Mahmud. "Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Pidana Uang Pengganti", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Doi: <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.568>
- Suci, Aurora Tifani & Yana Indawati. 2025. "Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7. Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1128>
- T., Naylor, R. 1999. "Wash-out: A Critique of Follow The Money Methods in Crime Control Policy". *Crime, Law and Social Change*, Vol. 32, No. 1.

- Wardhani, Shinfani Kartika & Waluyo. 2022. “Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)”. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2, No. 1. Doi: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>
- Welang, P. Iskandar. 2020. “Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Corruptio*, Vol. 01, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2071>
- W., Made Oka C. 2021. “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk1816>
- Yofiza., dkk. 2025. “Implementasi Pendekatan Follow the Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3, No. 1.

D. Lain-Lain

- Fajar, Ilham. 2025. Tesis: *Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat*. Universitas Andalas, 2025.
- Hasan, Imam Nurhakim. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Tesis: Universitas Islam Indonesia.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Bramantyo Adi Purnomo, S. I. P., selaku Staf Sesi Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada 24 September 2025.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Normadi Elfajr, S.T., S.H., M.H., selaku Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada 24 September 2025.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Zalmianto Agung Saputro, S.H., M.H., selaku Kepala Sesi Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada 24 September 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, 22 Juli 2025, diakses pada 10 Oktober 2025.

- Pratiwi, Fajar Desi. 2020. Tesis: *Peradilan In Absentia dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)*. Universitas Batanghari.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Profil PPATK*, 2023, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 02 Januari 2026.
- Saputra, Riswal. 2012. Tesis: *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa*. Universitas Hasanuddin.
- Shoim, Muhammad. (2019). Laporan Penelitian Individual: *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Zega, Dea Vony Nifili. (2024). Tesis: *Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan secara In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Tersangka yang Tidak Pernah Diperiksa pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)*. Universitas Sumatera Utara.